PROPOSAL INOVASI
SISTEM INFORMASI BASIS DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(SI BAKSO)



DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
2022

PROFIL INOVASI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

1. NAMA INOVASI : SI BAKSO
2. INISIATOR INOVASI : PURYANTI, SP
3. TAHAPAN INOVASI : PENERAPAN
4. JENIS INOVASI : DIGITAL
5. BENTUK INOVASI : TEKNOLOGI INFORMASI
6. WAKTU IMPLEMENTASI : DESEMBER 2020

RINGKASAN INOVASI :

Penetapan sebagai Pandemi Covid-19 diimbangi dengan pembatasan aktivitas berskala besar dalam upaya mengurangi kerumunan dan penularan Covid-19. Namun di sisi lain telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat suatu kebijakan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak dengan menyalurkan bantuan sosial.

Data penerima manfaat BST APBD Natuna dan Bantuan Sembako Provinsi Kepri diusulkan dari Desa/Kelurahan yang perlu diverifikasi apakah usulan tersebut sudah atau belum menerima bantuan sosial dari Kemensos, BST DKP dan BST DD. Proses verifikasi secara manual ini memakan waktu dan SDM. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi data terintegrasi.

Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah bagaimana merancang sebuah sistem berbasis data yang akurat dan mutakhir dalam mengelola informasi data terpadu kesejahteraan sosial yang dinamakan SI BAKSO.

Inovasi dimulai pada bulan Juli 2020 lalu dengan mengkoordinasikan wacana membuat aplikasi ke BP3D, BPKPD dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembuatan aplikasi membutuhkan anggaran dengan DPA Perubahan Kegiatan Pendataan PMKS Tahun 2020. Untuk penguatan Tim Pengelolaan SI BAKSO, maka ditetapkan dengan SK Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2020.

BP3D dan BPKPD melakukan pengalihan anggaran dalam DPA Perubahan, Dinas Komunikasi dan Informatika membuat sub domain aplikasi, Dinas Sosial mempersiapkan data-data, dan tenaga ahli merancang dan membuat aplikasi.

Dengan adanya aplikasi SI BAKSO ini akan mempermudah sistem kerja dalam memverifikasi data usulan penerima manfaat untuk ditetapkan sebagai penerima BST APBD Natuna dan Bantuan Sembako Propinsi Kepri. Data-data penerima manfaat bantuan sosial dari berbagai sumber penganggaran terintegrasi sehingga tidak adanya data yang ganda.

Adanya aturan baru dari Kementerian Sosial, dimana format DTKS sudah terjadi pembaharuan sehingga tidak sesuai dengan format di aplikasi. Ke depannya perlu adanya pengembangan aplikasi dengan penyesuaian dan penambahan fitur serta aplikasi ini sebagai base data. Bukan hanya terkait dengan bantuan sosial namun juga data penyandang disabilitas, ODGJ, lansia dan bencana, serta data lainnya yang disajikan oleh Dinas Sosial.

DAFTAR ISI

PROFIL INOVASI i
RINGKASAN INOVASI i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan dan Manfaat 1
BAB II METODOLOGI 2
BAB III PELAKSANAAN INOVASI 3
3.1. Langkah dan Tahapan Pelaksanaan Inovasi 3
3.2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan 5
3.3. Anggaran 5
BAB IV HASIL INOVASI 6
4.1. Sebelum Adanya SI BAKSO 7
4.2. Setelah Adanya SI BAKSO 8
BAB V PENUTUP 9
5.1. Strategi Keberlanjutan 9
5.2. Evaluasi 9
LAMPIRAN 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan PSBB ini membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktifitas seperti sebelum adanya pandemi. Hal ini menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Karena lapangan pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, selain banyaknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 2,76 juta orang dibandingkan pada tahun 2019 (BPS, 2021). Adanya dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat membuat Pemerintah meluncurkan kebijakan kompensasi bantuan sosial kepada masyarakat paling miskin dan rentan miskin.

Banyaknya bantuan sosial yang bergulir dari APBN maupun APBD, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyiapan data membuat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, mendapatkan bantuan ganda, dan berbagai carut marut permasalahan yang terjadi.

Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah bagaimana merancang sebuah sistem berbasis data yang akurat dan mutakhir dalam mengelola informasi data terpadu kesejahteraan sosial yang dinamakan SI BAKSO.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan menciptakan aplikasi SI BAKSO ini adalah untuk menyediakan informasi data yang akurat dan terintegrasi sehingga bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran.

Sedangkan manfaat dengan adanya SI BAKSO ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah dapat menjadi dasar penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Penerima manfaat terintegrasi dalam satu sistem data sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang akan terjadi.

BAB II
METODOLOGI

SI BAKSO merupakan kebaruan sistem informasi digital yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial sejak tahun 2020 lalu mengingat banyaknya jenis bantuan sosial dan data dari berbagai sumber. Bantuan sosial bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepri dan APBD Kabupaten Natuna. Sedangkan data penerima manfaat bersumber dari hasil musyawarah desa / kelurahan, yang mana datanya harus padan dengan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta data dari Kementerian Sosial.

Banyaknya sumber data dan banyaknya jenis bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD memicu terjadinya data ganda dan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, perlu adanya sebuah aplikasi digital yang bisa mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan jenis-jenis bantuan sosial. SI BAKSO sebagai solusi untuk mengintegrasikan data-data penerima manfaat bantuan sosial sehingga tidak adanya penerima manfaat yang ganda dan tepat sasaran.

Pada tanggal 6 Juli 2020 telah dilaksanakan rapat internal Dinas Sosial terkait evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD serta berbagai permasalahan yang ditemukan di setiap desa / kelurahan, Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem informasi data yang akurat dan terintegrasi.

Selanjutnya dilaksanakan koordinasi dengan BP3D, Diskominfo dan BPKPD pada tanggal 14 Agustus 2020 terkait rencana membangun sistem informasi basis data tersebut yang kemudian disepakati bahwa segala biaya diusulkan di dalam RKA Perubahan tahun 2020. Di hari yang sama, Dinas Sosial menerima DPA Perubahan Kegiatan Pendataan PMKS Tahun 2020 dan siap untuk memulai merancang sebuah sistem basis data yang akurat dan mutakhir dalam mengelola informasi data terpadu kesejahteraan sosial.

Di dalam penguatan Tim Pengelola Sistem Informasi Basis Data Kesejahteraan Sosial, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2020 yang mengatur uraian tugas masing-masing jabatan Tim Pengelola.

BAB III
PELAKSANAAN INOVASI

3.1. Langkah dan Tahapan Pelaksanaan Inovasi

Setelah diterimanya DPA Perubahan kegiatan Pendataan PMKS tahun 2020, Dinas Sosial menyurati Kepala Dinas Kominfo untuk permintaan Sub Domain aplikasi SI BAKSO Natuna pada tanggal 14 Agustus 2020. Di samping itu, juga menyurati dan meminta daftar nama-nama yang berkompeten dalam Tim Pengelola untuk disusun Surat Keputusan Bupati Natuna.

Dengan ditetapkannya Tim Pengelola dalam SK Bupati Natuna tanggal 25 Agustus 2020, maka dilakukan rapat internal Tim Pengelola yang membahas tentang pelaksanaan pembuatan sistem informasi dan peran masing-masing *stakeholders* pada tanggal 26 Agustus 2020.



Masing-masing Tim melakukan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya hingga tanggal 10 Oktober 2020. Pada tanggal 13 Oktober 2020 dilaksanakan rapat progress pemasangan SI BAKSO sehingga dilaksanakan kegiatan lanjutan pada tanggal 14 – 27 Desember 2020.

Di dalam tahap perancangan dan pemasangan ini juga sambil dilaksanakan evaluasi aplikasi pada tanggal 23 Desember 2020 untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan pada aplikasi ini. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa aplikasi sudah sempurna sesuai dengan kebutuhan dan membuat laporan akhir pada tanggal 29 Desember 2020 serta aplikasi siap digunakan.

Hingga akhir 2020, aplikasi sudah selesai dirancang dan dibuat serta sudah dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi data penerima manfaat agar tidak terjadinya tumpang tindih data, di mana bentuk aplikasinya sebagai berikut :

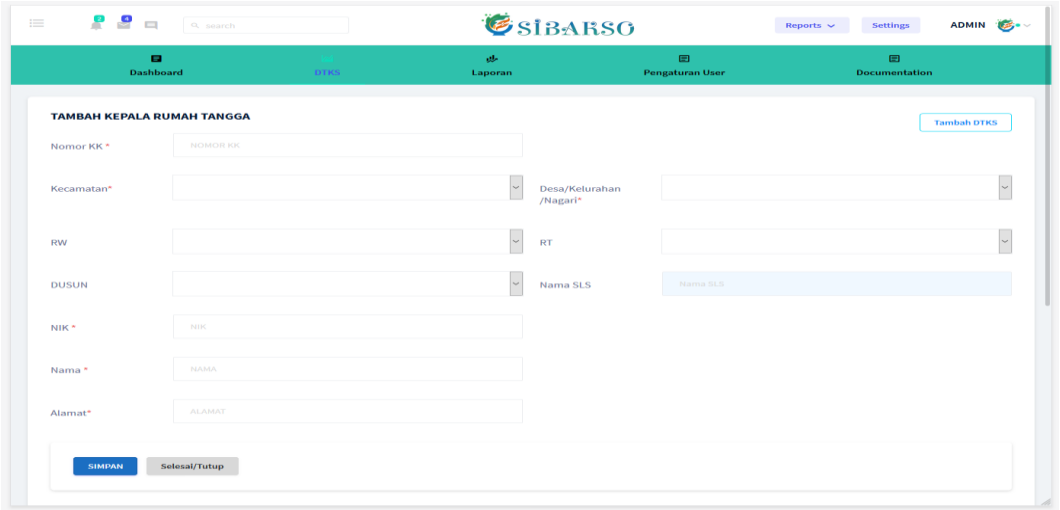




Data Master Kepala Rumah Tangga



Fitur untuk menambah DTKS Rumah Tangga



3.2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Adapun pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemasangan aplikasi SI BAKSO ini selain dari Dinas Sosial, Badan Perencanan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta tenaga ahli di bidang Informasi dan Teknologi (IT).

BP3D dan BPKPD melakukan pengalihan anggaran dalam DPA Perubahan, Dinas Komunikasi dan Informatika membuat sub domain aplikasi, Dinas Sosial mempersiapkan data-data, dan tenaga ahli merancang dan membuat aplikasi.

Para pihak-pihak yang terlibat tergabung dan melebur ke dalam satu Tim Pengelola dengan jabatan-jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari jabatan Manajer Tim, *Programmer and System Designer*, hingga *Administrator System* yang ke semuanya memiliki peran dan tugas masing-masing dalam mempersiapkan aplikasi SI BAKSO hingga siap digunakan.

3.3. Anggaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2020 bahwa segala biaya yang terkait pembuatan aplikasi ini bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Natuna Tahun 2020 melalui kegiatan Pendataan Penanganan Fakir Miskin pada rekening :

a. Belanja Honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber/fasilitator PNS sebesar Rp. 137.000.000,-
b. Belanja Honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber/fasilitator Non PNS sebesar Rp. 25.400.000,-

Pembebanan biaya hanya terkait dengan honorarium tenaga ahli PNS dan tenaga ahli Non PNS mengingat perangkat, jaringan dan domain aplikasi sudah disediakan masing-masing OPD yang terlibat dalam pembuatan SI BAKSO ini.

BAB IV
HASIL INOVASI

Penetapan sebagai Pandemi *Covid-19* diimbangi dengan pembatasan aktivitas berskala besar dalam upaya mengurangi kerumunan dan penularan *Covid-19*. Namun di sisi lain telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat suatu kebijakan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak dengan menyalurkan bantuan sosial.

Adapun jenis bantuan sosial dan sumber anggarannya dapat dilihat pada Tabel ini.

JENIS DAN SUMBER ANGGARAN BANTUAN SOSIAL

No.	Nama Bantuan	Jenis Bantuan	Sumber Anggaran	Ket
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Non Tunai	APBN	
2.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Sembako	APBN	
3.	BST Kemensos	Tunai	APBN	
4.	BST DKP	Tunai	APBN	
5.	Sembako Provinsi Kepri	Sembako	APBD Prov Kepri	
6.	BST APBD Natuna	Tunai	APBD Natuna	

Dengan banyaknya bantuan sosial dan sumber anggaran memicu terjadinya tumpang tindih penerima manfaat serta adanya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi data terintegrasi.

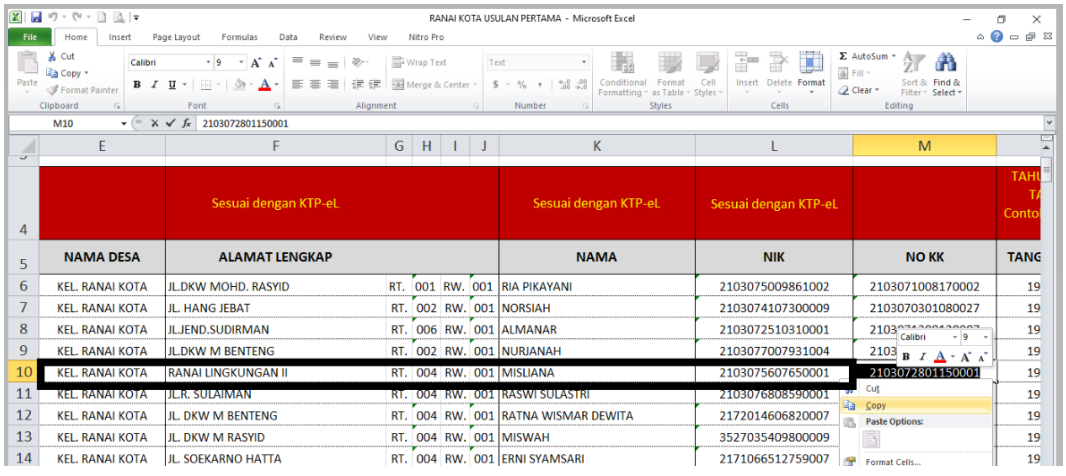
Dalam menjelaskan hasil dari inovasi SI BAKSO ini, maka perlu dipilah cara kerjanya baik sebelum maupun setelah adanya aplikasi SI BAKSO, sebagai berikut :

4.1. Sebelum Adanya SI BAKSO

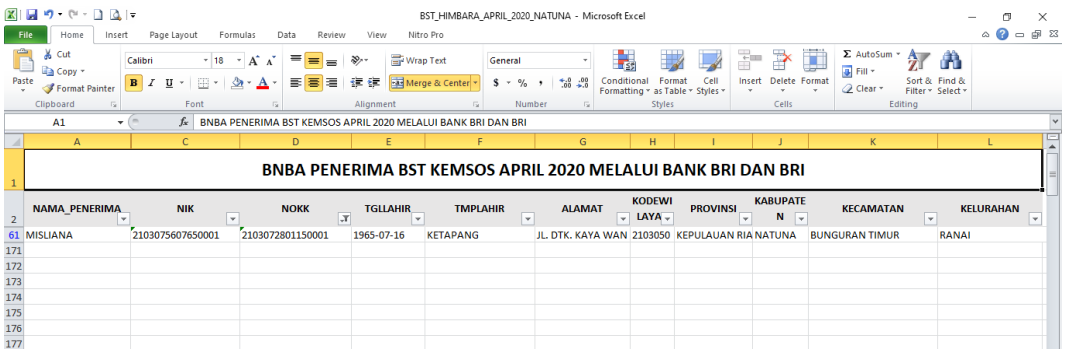
Data penerima bantuan sosial langsung dari Kementerian Sosial, selanjutnya juga disalurkan bantuan-bantuan sosial lainnya baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau, maupun dari APBD Kabupaten Natuna.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial, namun selain itu juga bias diberikan kepada penerima di luar DTKS yang sudah di verifikasi terlebih dahulu. *BNBA* penerima manfaat BST Kemsos disampaikan ke Dinas Sosial. Kemudian baik Provinsi Kepri maupun Kabupaten Natuna juga akan memberikan bantuan sosial, maka data disampaikan oleh Kepala Desa / Kelurahan diverifikasi secara manual.

Data penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial, BLT DD dan BST DKP sudah disiapkan dari instansi masing-masing. Sedangkan data penerima manfaat BST APBD Natuna dan Bantuan Sembako Provinsi Kepulauan Riau diusulkan dari Desa / Kelurahan yang perlu diverifikasi apakah usulan tersebut sudah atau belum menerima bantuan sosial lainnya. Proses verifikasi secara manual ini memakan waktu dan SDM.



	NAMA DESA	ALAMAT LENGKAP				NAMA	NIK	NO KK	TANG
		Sesuai dengan KTP-eL				Sesuai dengan KTP-eL	Sesuai dengan KTP-eL		
6	KEL. RANAI KOTA	JL.DKW MOHD. RASYID	RT.	001	RW. 001	RIA PIKAYANI	2103075009861002	2103071008170002	19
7	KEL. RANAI KOTA	JL. HANG JEBAT	RT.	002	RW. 001	NORSIAH	2103074107300009	2103070301080027	19
8	KEL. RANAI KOTA	JL.JEND.SUDIRMAN	RT.	006	RW. 001	ALMANAR	2103072510310001	2103	19
9	KEL. RANAI KOTA	JL.DKW M BENTENG	RT.	002	RW. 001	NURJANAH	2103077007931004	2103	19
10	KEL. RANAI KOTA	RANAI LINGKUNGAN II	RT.	004	RW. 001	MISLIANA	2103075607650001	2103072801150001	19
11	KEL. RANAI KOTA	JLR. SULAIMAN	RT.	004	RW. 001	RASWI SULASTRI	2103076808590001		19
12	KEL. RANAI KOTA	JL. DKW M BENTENG	RT.	004	RW. 001	RATNA WISMAR DEWITA	2172014606820007		19
13	KEL. RANAI KOTA	JL. DKW M RASYID	RT.	004	RW. 001	MISWAH	3527035409800009		19
14	KEL. RANAI KOTA	JL. SOEKARNO HATTA	RT.	004	RW. 001	ERNI SYAMSARI	2171066512759007		19



BNBA PENERIMA BST KEMSOS APRIL 2020 MELALUI BANK BRI DAN BRI

	NAMA_PENERIMA	NIK	NOKK	TGLLAHIR	TMPLAHIR	ALAMAT	KODEWILAYA	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN
61	MISLIANA	2103075607650001	2103072801150001	1965-07-16	KETAPANG	JL. DTK. KAYA WAN	2103050	KEPULAUAN RIA	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI

Sebagaimana tergambarkan di atas bahwa seorang calon penerima manfaat yang diusulkan oleh Lurah Ranai, juga sebagai penerima manfaat bansos BST Kemsos yang disalurkan melalui Bank penyalur. Pengecekan per data yang diajukan oleh Kades/Lurah secara manual, terdapat beberapa penerima manfaat bantuan sosial yang ganda. Proses pengecekan secara manual ini membutuhkan waktu, SDM dan ketelitian yang lebih, sedangkan setiap pekerjaan ada batasan waktu. Hal inilah yang mendasari perlunya sebuah aplikasi terintegrasi data usulan dengan penerima manfaat bansos lainnya sehingga tidak memakan waktu yang panjang dalam melakukan verifikasi usulan.

4.2. Setelah Adanya SI BAKSO

Berbagai carut marut data penerima manfaat bantuan sosial perlu pembenahan untuk memverifikasi data usulan sehingga tidak adanya data ganda, seorang penerima manfaat mendapatkan 2 (dua) atau lebih bantuan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam bentuk excel diinput ke aplikasi, sehingga dapat banyak data yang akan dihasilkan seperti data kepala rumah tangga, data anggota rumah tangga, data penerima bantuan sosial dari berbagai jenis dan sumber penganggarannya.

Dengan adanya aplikasi SI BAKSO ini, data usulan dari Desa / Kelurahan untuk jenis BST APBD Natuna dan Bantuan Sembako Provinsi Kepri dapat diverifikasi dengan cepat dan akurat sehingga penerima manfaat bantuan sosial yang akan didanai dari APBD Kabupaten dan Provinsi tidak tumpang tindih dengan data penerima bantuan sosial lainnya.

BAB V
PENUTUP

5.1. Strategi Keberlanjutan

Ketersediaan data yang terintegrasi di dalam sebuah aplikasi SI BAKSO sangat membantu dalam mempermudah pekerjaan pendataan penerima manfaat bantuan sosial sehingga tidak adanya penerima manfaat yang ganda dan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran.

Setelah digunakan dan menyesuaikan dengan aturan baru dari Kementerian Sosial, format Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terjadi pembaharuan sehingga tidak sesuai dengan format di aplikasi. Ke depannya perlu adanya pengembangan aplikasi dengan penyesuaian dan penambahan fitur serta aplikasi ini sebagai *base data* keseluruhan data di Dinas Sosial. Bukan hanya terkait dengan bantuan sosial namun juga data penyandang disabilitas, lansia dan bencana, serta data lainnya yang disajikan oleh Dinas Sosial.

Untuk itu, perlu pembahasan dan komitmen bersama antar *stakeholders* dalam pembiayaan pengembangan aplikasi pada APBD Perubahan 2022 ini.

5.2. Evaluasi

Evaluasi yang sudah dilakukan untuk melihat kesesuaian fitur aplikasi dengan kebutuhan data yang akan diintegrasikan sehingga jika masih ada hambatan ataupun kekurangan, maka perlu diadakan perbaikan sistem. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan ditindaklanjuti dengan perlaksanakan tugas lanjutan demi kesempurnaan aplikasi.

Evaluasi dan perbaikan dilaksanakan oleh semua pihak yang tergabung dalam Tim Pengelola sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2020. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada semua yang terlibat dalam pengadaan dan pelaksanaan inovasi SI BAKSO ini.

LAMPIRAN

1. Foto Pembahasan Pembuatan Aplikasi SI BAKSO






SHOT ON MI 9T PRO
AI TRIPLE CAMERA


SHOT ON MI 9T PRO
AI TRIPLE CAMERA

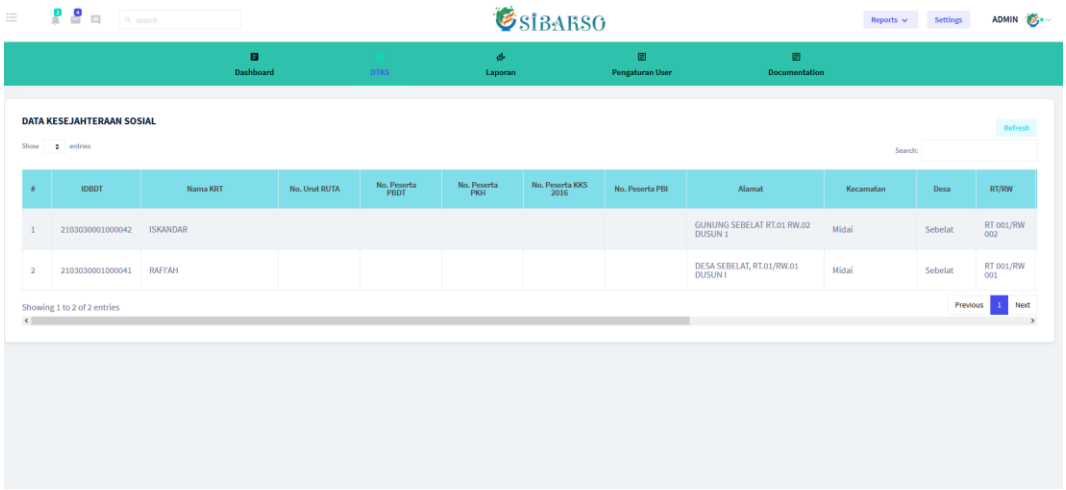
2. Foto Aplikasi SIBAKSO

Tampilan halaman login

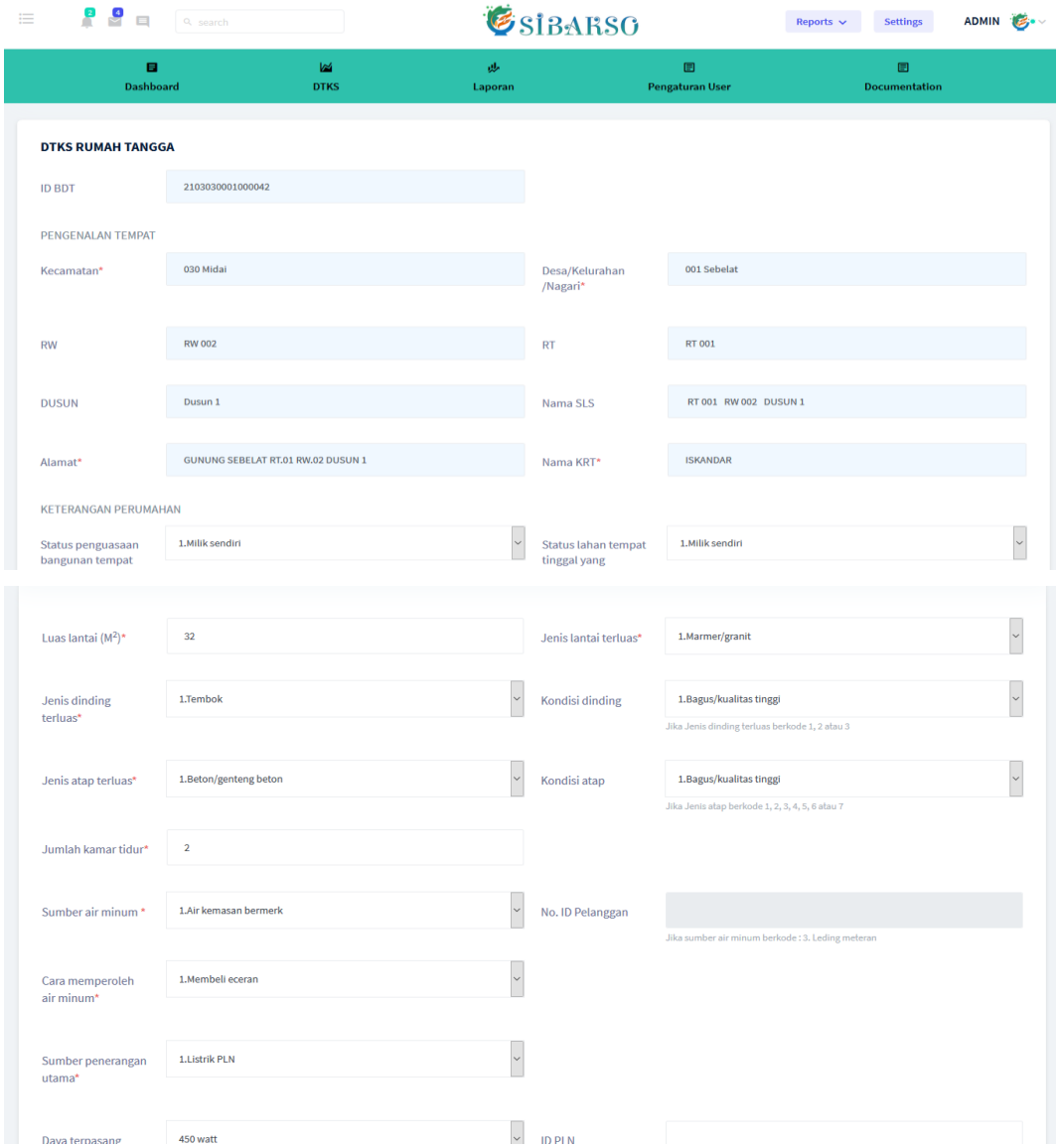




Desain Menu DTKS



Desain form tambah/Ubah/View DTKS



Bahan bakar/energi utama untuk memasak* : 1.Listrik

No. ID Pelanggan

Jika sumber bahan bakar berkode : 4. Gas kota/biogas

Penggunaan fasilitas tempat buang air besar* : 1.Sendiri

Jenis kloset* : 1.Leher angsa

Tempat pembuangan akhir tinja* : 1.Tangki

KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM

1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut * :

a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih — ○ YA ● TIDAK

b. Lemari es/kulkas — ○ YA ● TIDAK

c. AC — ○ YA ● TIDAK

d. Pemanas air (water heater) — ○ YA ● TIDAK

e. Telepon — ○ YA ● TIDAK

f. Televisi — ○ YA ● TIDAK

g. Emas/perhiasan & tabungan (senilai 10 gram emas) — ○ YA ● TIDAK

h. Komputer/laptop — ○ YA ● TIDAK

i. Sepeda — ○ YA ● TIDAK

j. Sepeda motor — ● YA ○ TIDAK

k. Mobil — ○ YA ● TIDAK

l. Perahu — ○ YA ● TIDAK

m. Motor tempel — ○ YA ● TIDAK

n. Perahu motor — ○ YA ● TIDAK

o. Kapal — ○ YA ● TIDAK

2. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut * :

a. Lahan — ○ YA ● TIDAK

Luas lahan : Luas lahan

b. Rumah di tempat lain — ● YA ○ TIDAK

3. Jumlah ternak yang dimiliki (ekor) :

a. Sapi : Jumlah Sapi

b. Kerbau : Jumlah Kerbau

c. Kuda : Jumlah Kuda

d. Babi : Jumlah Babi

e. Kambing/Domba : Jumlah Kambing/Domba

4. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/bersama

● YA ○ TIDAK

Tambah usaha yang dimiliki

NAMA	KODE LAPANGAN USAHA	LAPANGAN USAHA (TULIS SECARA LENGKAP)	JUMLAH PEKERJA (ORANG)	TEMPAT/LOKASI USAHA	OMSET USAHA PERBULAN

5. Rumah tangga menjadi peserta program/memiliki kartu program berikut :

a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS) — ○ YA ● TIDAK

b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Bantuan Siswa Misikin (BSM) — ○ YA ● TIDAK

f. Asuransi kesehatan lainnya — ○ YA ● TIDAK

g. Program Keluarga Harapan (PKH) — ○ YA ● TIDAK

h. Beras untuk orang miskin (Raskin)

c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan/Jamkesmas

○ YA ◉ TIDAK

d. BPJS Kesehatan peserta mandiri

○ YA ◉ TIDAK

e. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/BPJS ketenagakerjaan

○ YA ◉ TIDAK

h. Beras untuk orang miskin (Raskin)

○ YA ◉ TIDAK

i. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

○ YA ◉ TIDAK

Tambah Anggota Rumah Tangga

	No. Urut	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah tangga ini BAIK DEWASA, ANAK-ANAK, MAUPUN BAYI. Tuliskan nama sesuai dengan identitas, beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK))	Hubungan dengan kepala rumah tangga	Nomor urut keluarga	Hubungan dengan kepala keluarga	Jenis kelamin	Umur (Tahun)	Status perkawinan	Jika KOL (8) = 2 atau 3 Kepemilikan akta/buku nikah atau akta cerai	Ter...
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Ubah	1	ISKANDAR 2103030001000042	1.Kepala rumah tangga	1	1.Kepala keluarga	1.Laki-laki	44	2.Kawin/nikah	0.Tidak	2.